

KEPUTUSAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PEMALANG
NOMOR : 791/HK.01.01/K.JT-19/10/2024

TENTANG
SUSUNAN KELOMPOK KERJA PENGAWASAN ISU-ISU NEGATIF
DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI
DAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEMALANG

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka mengefektifkan tugas Bawaslu Provinsi/Panwaslih Aceh, Bawaslu/Panwaslih Kabupaten/Kota dalam melakukan pengawasan konten internet pada Penyelenggaraan Pemilihan Tahun 2024 yang terintegrasi
 - b. Bahwa berdasarkan Nota Kesepahaman Aksi antara Badan Pengawas Pemilihan Umum dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika pada tanggal 18 Januari Tahun 2023 yang menyatakan ruang lingkup kerjasama berupa pengawasan konten internet dalam tahapan Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024;
 - c. Berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b tersebut dipandang perlu untuk menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pemalang Tentang Susunan Anggota Kelompok Kerja Pengawasan Isu-Isu Negatif Pada Tahapan Kampanye Pemilihan Tahun 2024.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana diubah beberapa kali, terakhir menjadi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir menjadi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang.
 3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota.
 4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum.
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota.
 6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.
 7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota
 8. Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 127/PM.00/K1/03/2023 tentang Perubahan atas Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 274/PM.00/K1/08/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

- 9. Surat Edaran Nomor 102 Tahun 2024 Tentang Pencegahan Pelanggaran Dan Pengawasan Konten Internet (Siber) Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Serta Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024
- 10. Nota Kesepakatan Aksi antara Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 0203.1/HM.02.00/K1/01/2023, Nomor 1/MoU/M.KOMINFO/HK.04.02/01/2023 tentang Pengawasan;
- 11. Surat Perintah Kapolres Pemalang Nomor : Sprin/1235/X/KEP/2024 Perihal Penugasan Anggota Kelompok Kerja Pengawasan Isu-Isu Negatif Bawaslu Kabupaten Pemalang;
- 12. Surat Diskominfo Kabupaten Pemalang Nomor : 500.12/1920/Diskominfo, Perihal Penugasan Anggota Kelompok Kerja Pengawasan Isu-Isu Negatif Bawaslu Kabupaten Pemalang.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Menetapkan Anggota Kelompok Kerja (Pokja) Pengawasan Isu-Isu Negatif Bawaslu Kabupaten Pemalang dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Anggota Kelompok Kerja (Pokja) sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sesuai dengan kedudukannya pada tim dengan rincian sebagai berikut:
- a. Pengarah bertugas memberikan arah kebijakan umum dalam pengawasan konten internet dan mengawasi pelaksanaan fasilitasi pengawasan konten internet;
 - b. Penanggung jawab bertugas memberikan arahan teknis pengawasan konten internet yang dilaksanakan oleh pelaksana;
 - c. Sekretaris pengarah bertugas memfasilitasi seluruh kebutuhan yang diperlukan oleh pengarah dan penanggung jawab;
 - d. Ketua dan Wakil Ketua bertugas mengoordinasikan seluruh pelaksanaan pengawasan konten internet serta melaporkan seluruh hasil pelaksanaan fasilitasi pengawasan konten internet kepada Penanggung jawab melalui Sekretaris pengarah;
 - e. Sekretaris dan Wakil Sekretaris bertugas memantau serta memfasilitasi seluruh kebutuhan yang diperlukan oleh aktifitas tim;
 - f. Anggota bertugas mengidentifikasi, menganalisa dan mengintegrasikan hasil pengawasan konten internet yang terdapat isu-isu negatif serta merekomendasikan hasil pengawasan kepada seluruh anggota Kelompok Kerja (Pokja) melalui pengarah dan penanggungjawab;
- KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Daftar isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Kabupaten Pemalang dan atas tugas-tugasnya diberikan Honorarium dengan perincian sebagai berikut;
- a. Penasehat : Rp.2.000.000,-
 - b. Penanggungjawab : Rp.1.800.000,-
 - c. Ketua : Rp.1.500.000,-
 - d. Sekretaris : Rp.1.300.000,-
 - e. Anggota : Rp.1.200.000,-
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pemalang
Pada tanggal 3 Oktober 2024



SUSUNAN ANGGOTA KELOMPOK KERJA (POKJA) PENGAWASAN ISU-ISU NEGATIF
DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI
DAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024

No.	Nama	Jabatan	Kedudukan Dalam Tim
I. Pengarah dan Penanggaung Jawab			
1.	Sudadi, S.H.	Ketua Bawaslu Kabupaten Pemalang	Pengarah
2.	Syaefudin Juhri, S.H.	Kordiv Pencegahan, Parmas dan Humas Bawaslu Pemalang	Penanggungjawab
II. Ketua dan Sekretaris			
3.	Ika Indra Sanjaya, S.Pd.	Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Data Informasi Bawaslu Pemalang	Ketua
4.	Chairul Umam, S.H.I.	Koordinator Divisi Hkum & Penyelesaian Sengketa Bawaslu Pemalang	Sekretaris
III. Anggota			
5.	Mustaghfirin, S.Pd.I.	Koordinator Divisi SDM dan Diklat Bawaslu Pemalang	Anggota
6.	Edy Siswanto, S.H.	Koordinator Sekretariat Bawaslu Pemalang	Anggota
7.	Arya Anggara Pranadhita, S.H.	Bendahara Pengeluaran Pembantu Bawaslu Pemalang	Anggota
8.	IPDA Suritno, S.H.	NRP 74080305 KAURBINOPSNAL SATINTELKAN POLRES PEMALANG	Anggota
9.	BRIPKA Hendra Fibrian Nugroho, S.H.	NRP 88020239 PS KANIT 1 SATINTELKAM POLRES PEMALANG	Anggota
10.	Heyder	Pengadministrasi Data Penyajian dan Publikasi (Penata Muda Tingkat 1/ IIIb NIP : 19690119 199103 1 005) Diskominfo Kabupaten Pemalang	Anggota
11.	Nandya Safira, S.I.Kom	Pelaksana Non PNS Diskomnfo Kabupaten Pemalang	Anggota
12.	Hamzah Al Amin, S.H.	Staf Sekretariat Bawaslu Kabupaten Pemalang	Anggota
13.	Kurniamin, S.Pd.	Staf Sekretariat Bawaslu Kabupaten Pemalang	Anggota
14.	Abdul Jamal Ismail, S.Pd.I	Staf Sekretariat Bawaslu Kabupaten Pemalang	Anggota
15.	Kurnia Zakiyah N., S.E.	Staf Sekretariat Bawaslu Kabupaten Pemalang	Anggota
16.	Dyah Candra Kirana, S.E.	Staf Sekretariat Bawaslu Kabupaten Pemalang	Anggota

Ditetapkan di Pemalang
Pada tanggal 3 Oktober 2024

Ketua,

Sudadi, S.H.